

## Transformasi Ekonomi Pembangunan: Strategi Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan Di Negara Berkembang

Ega Kurniawan<sup>\*1</sup>, Naim<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

\*Corresponding Author: [kurniawanega290@gmail.com](mailto:kurniawanega290@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Ekonomi Pembangunan, Strategi dan Tantangan, Pertumbuhan Berkelanjutan

*Received :* 5 Januari

*Revised :* 8 Januari

*Accepted :* 18 Januari

### ABSTRAK

Di negara berkembang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam Ekonomi Pembangunan. Dengan strategi yang berdampak positif, diharapkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai. Pendekatan yang dilakukan mencakup transformasi struktural, investasi di sektor strategis, dan pengembangan institusi yang efektif. Artikel ini meneliti strategi transformasi ekonomi pembangunan menggunakan teori dan pendekatan ekonomi pembangunan. Penelitian ini menyoroti pendekatan strukturalis dan institusionalis untuk memahami proses pembangunan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh efektivitas institusi, diversifikasi sektor ekonomi, akses pendidikan berkualitas, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial. Strategi ini penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Dinamika global yang melibatkan tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan membuat transformasi ekonomi menjadi suatu keharusan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Negara berkembang seringkali dihadapkan pada permasalahan seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan pengangguran. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan

adanya isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan dampak pandemi. Oleh karena itu, diperlukan strategi transformasi ekonomi yang terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengatasi tantangan pembangunan di negara berkembang. Penelitian oleh Acemoglu dan Robinson (2012) menunjukkan bahwa institusi yang inklusif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Institusi yang efektif mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, investasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Namun, di banyak negara berkembang, lemahnya institusi menjadi salah satu hambatan utama dalam transformasi ekonomi. Hal ini menuntut reformasi institusi agar mampu menghadapi tantangan pembangunan modern.

Selain institusi, diversifikasi sektor ekonomi juga menjadi fokus penting dalam transformasi ekonomi pembangunan. Lin (2011) dalam penelitiannya menekankan pentingnya investasi pada sektor strategis seperti teknologi, manufaktur, dan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Diversifikasi sektor ekonomi tidak hanya meningkatkan daya saing global tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi global. Namun, keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi menjadi kendala yang sering dihadapi negara berkembang dalam mencapai diversifikasi ekonomi.

Peran pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam transformasi ekonomi. Sachs (2015) menyoroti pentingnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan melalui kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, implementasi SDGs di negara berkembang menghadapi banyak kendala, seperti kapasitas institusi yang rendah, ketergantungan pada bantuan internasional, dan kurangnya pendanaan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan lokal untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di negara berkembang.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam transformasi ekonomi. Penelitian oleh Lee dan Lee (2020) menemukan bahwa peningkatan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan sosial mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2% per tahun di Asia Tenggara. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, strategi transformasi ekonomi di negara berkembang harus mencakup pendekatan holistik yang melibatkan reformasi institusi, diversifikasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan yang lebih inklusif dan resilient.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Indikator ekonomi pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang mencakup berbagai teori dan pendekatan, di antaranya:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi: (a) Adam Smith (1776): Menekankan pentingnya perdagangan internasional dan akumulasi modal dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. (b) David Ricardo (1817): Menambahkan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional melalui karyanya *Principles of Political Economy and Taxation*. (c) Robert Solow dan Trevor Swan (1956): Mengembangkan teori pertumbuhan neo-klasik, yang dikenal dengan Solow-Swan Growth Model, yang menunjukkan peran inovasi, teknologi, dan akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Pendekatan Strukturalis dan Institusional: (a) Raul Prebisch (1950-an): Mempopulerkan pendekatan strukturalis, terutama terkait pentingnya diversifikasi dan industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer. (b) Douglass North (1991): Menjelaskan peran institusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui konsep institusi formal dan informal dalam karyanya yang meraih Nobel Ekonomi.
3. Teori Ketergantungan: (a) Raul Prebisch (1949) dan Andre Gunder Frank (1967): Menyatakan bahwa negara-negara berkembang seringkali bergantung pada negara maju dalam sistem ekonomi global, dengan solusi berupa penguatan kapasitas lokal dan diversifikasi perdagangan.
4. Pembangunan Berkelanjutan: (a) Gro Harlem Brundtland (1987): Melalui laporan *Our Common Future*, konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. (b) Agenda SDGs (2015): Diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan.
5. Teori Modernisasi: (a) Walt Rostow (1960): Melalui bukunya *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, menjelaskan tahapan pembangunan dari masyarakat tradisional menuju modern melalui industrialisasi, urbanisasi, dan teknologi. (b) Kritik teori ini mencatat kurangnya perhatian terhadap konteks lokal dan potensi kerusakan lingkungan.
6. Pendekatan Ekonomi Digital: (a) Eric Brynjolfsson dan Andrew McAfee (2014): Melalui buku *The Second Machine Age*, menyoroti dampak digitalisasi pada efisiensi bisnis, inovasi, dan perluasan pasar. (b) World Economic Forum (2021): Menyoroti kesenjangan digital sebagai tantangan dalam transformasi digital di negara berkembang.

7. Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter: (a) John Maynard Keynes (1936): Dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, menjelaskan pentingnya kebijakan fiskal untuk mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. (b) Milton Friedman (1968): Menyoroti peran kebijakan moneter dalam stabilitas ekonomi melalui teori monetaris.
8. Pendekatan Gender dalam Pembangunan: (a) Amartya Sen (1999): Dalam bukunya *Development as Freedom*, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan untuk mendukung pembangunan ekonomi. (b) World Bank (2012): Dalam laporan *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*, menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak positif terhadap pembangunan.

## **METODOLOGI**

Artikel ini menggunakan tinjauan literatur sistematis, yang mencakup analisis komprehensif terhadap berbagai sumber seperti jurnal, laporan penelitian dan dokumen kebijakan dari organisasi internasional terkait ekonomi pembangunan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memilih literatur yang relevan berdasarkan kriteria tertentu seperti dalam hal kesesuaian topik, validasi sumber, dan kontribusi terhadap diskusi akademis. Analisis ini juga berupaya memahami tantangan yang muncul dalam implementasi pembangunan ekonomi, termasuk hambatan struktural, keterbatasan sumber daya, dan kendala institusional. Artikel ini juga memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang strategi transformasi ekonomi yang relevan dan efektif untuk diterapkan di negara berkembang.

## **HASIL PENELITIAN**

Salah satu peran institusi yakni sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi pertama kali diidentifikasi secara gamblang dan sistematis oleh Douglass North (1991), yang ditujukan untuk menenangkan peran institusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan menurunkan biaya transaksi. Douglass North juga menyoroti akan pentingnya institusi formal dan informal dalam keberlanjutan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya dan mendukung investasi. Dalam hal ini penunjang utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di negara berkembang yakni adanya institusi yang transparan dan kuat, telah terbukti bahwasanya institusi yang efektif tidak hanya menurunkan tingkat pelanggaran korupsi tetapi juga dapat dipastikan adanya kebijakan yang mendukung investasi serta sistem hukum yang adil.

Contohnya, seperti negara institusi yang dapat memberikan kepercayaan/kredibilitas akan sangat cenderung memiliki dampak yang positif dan memiliki usaha yang kondusif. Di mana sang investor akan merasa lebih

yakin untuk memberikan modalnya. Selain itu juga, institusi yang berjalan dengan baik akan sangat mampu mengelola sumber daya negara dengan lebih efisien, dan pendapatan hasil yang didapat negara digunakan sesuai sasaran seperti halnya digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketika institusi mulai labil, seringkali kebijakan ekonomi akan rentan terhadap ketidakstabilan politik dan perlahan berdatangan tekanan dari kepentingan kelompok tertentu yang pada akhir akan menjadi penghambat pembangunan.

Selain itu, sejak pertengahan abad ke-20 konsep diversifikasi ekonomi telah menjadi fokus penelitian, karena banyaknya negara berkembang yang mengalami krisis akibat ketergantungan pada ekspor komoditas. Contohnya pada karya Raul Prebisch 1920 an menyatakan melalui teori ketergantungan yang membahas ketergantungannya negara berkembang pada negara maju. Dan yang menjadi perhatian penuh pada negara berkembang terhadap ketergantungan ini adalah pada satu atau dua komoditas utama, seperti hasil pertanian, minyak dan gas. Dampak ketergantungan ini akan membuat ekonomi menjadi rentang terhadap fluktuasi harga pasar global yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi salah satu hal yang krusial dalam peningkatan ketahanan ekonomi. Diversifikasi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pada pengembangan sektor manufaktur dan jasa, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Misalnya, menyorot pada negara asia tenggara yang mana mereka telah berhasil mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan upaya menjalan pengembangan pada sektor teknologi informasi dan pariwisata. Maka dengan hal-hal tersebut diversifikasi ekonomi juga turut andil pada peningkatan banyaknya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan memastikan pemerataan pendapatan pada masyarakat.

Kemudian hubungan investasi antara pendidikan dan infrastruktur pada pembangunan ekonomi telah didukung oleh teori ekonomi pembangunan yang dikembangkan oleh para ekonom, Theodore Schultz (1961), yang menyorot pada "modal manusia" sebagai peran utama dalam produktivitas pertumbuhan ekonomi. Dan Paul Rosenstein-Rodan (1943) dalam bidang infrastruktur juga menunjukkan pentingnya "lompatan besar" dalam investasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dua pilar itulah yang menjadi pondasi besar pembangunan yakni pendidikan dan infrastruktur. Pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian modern dengan memastikan berkualitasnya pendidikan masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, memberikan kesempatan akses ke pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pasar/lapangan kerja yang nantinya bisa memberikan sumbangsih dan menghasilkan tenaga kerja yang inovatif dan produktif. Disisi lain pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan,

jaringan listrik dan telekomunikasi sangat penting untuk aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang mumpuni akan sangat mempercepat pendistribusian barang dan jasa tetapi juga harus tetap memperhatikan hasil yang telah dibuat, sehingga konektivitas antar wilayah menjadi lebih mudah. Tanpa adanya investasi yang cukup dalam bidang pendidikan dan infrastruktur maka negara berkembang akan tetap mengalami hambatan dalam bersaing di pasar global.

Terakhir, yang menjadi gagasan bahwa ketimpangan ekonomi sanga menjadi penghambat pembangunan, ini pertama kali dirumuskan secara formal oleh Simon Kuznets (1955) dalam teori distribusi pendapatan, yang menciptakan Kurva Kuznets. Teori ini menyatakan bahwa di awal-awal pembangunan ketimpangan sangat meningkat kemudian seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi mulai menurun. Salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan inklusif adalah ketimpangan ekonomi ini. Ketimpangan berpotensi memicu konflik sosial yang dapat memperlambat stabilitas ekonomi dan juga menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan ketimpangan akan sangat penting dalam pembangunan ini. Seperti halnya penerapan pajak progresif di mana setiap individu atau suatu perusahaan dengan pendapatan yang tinggi harus membayar pajak lebih besar yang nantinya akan digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat, hal ini merupakan salah satu pendekatan yang efektif dengan melalui redistribusi pendapatan. Selain itu juga, dengan memberikan subsidi untuk kesehatan, biaya pendidikan, dan perumahan juga akan sangat membantu masyarakat miskin untuk keberlangsungan kualitas hidup mereka. Dengan mengurangi ketimpangan, negara nantinya tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih adil tetapi juga semakin banyaknya peningkatan stabilitas sosial yang akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, dalam pembangunan ekonomi haruslah di suport dengan institusi yang kuat, efektif dan transparan. Institusi bisa dikatakan berjalan dengan baik jika menciptakan kestabilan ekonomi, mendukung keadilan dalam investasi melalui kebijakan dan menurunkan biaya transaksi. Institusi juga berperan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, melalui proyek - proyek yang berdampak langsung pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penggunaan pendapatan negara, serta memberikan kredibilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan pada investor. Sebaliknya, jika institusi melemah maka akan memicu adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi yang sangat menghambat pembangunan

Selain itu yang menjadi penghambat negara berkembang masih ketergantungan ekspor seperti minyak, atau hasil pertanian membuat ekonomi rentan terhadap perubahan yang terjadi di pasar global. Hal ini bisa ditanggulangi dengan mengembangkan sektor teknologi, jasa dan manufaktur, dengan memperkuat

ketahanan ekonomi, menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru, dan mengurangi pengangguran. Hal yang perlu diperhatikan juga yakni pada sektor pendidikan harus meningkatkan keterampilan, dalam dunia kerja sehingga mereka dapat lebih produktif dan inovatif. Sementara itu untuk infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi mempercepat pendistribusian barang dan jasa serta dapat menjangkau lebih luas konektivitas antar wilayah. Kedua sektor ini menjadi pondasi penting dalam pembangunan modern. Terakhir, dalam hal ketimpangan ekonomi maka akan banyak dampak yang memicu ketidakstabilan sosial dan memperlambat pembangunan langkah yang dapat diambil adalah dengan pemerataan pajak progresif, subsidi biaya pendidikan, asuransi kesehatan, dan tempat lindung yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan terus mendapat dukungan untuk pemerataan tumbuhnya ekonomi.

## **REKOMENDASI**

1. Penguatan Institusi  
Institusi yang transparan, kuat, dan efektif merupakan pondasi utama pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung investasi, sistem hukum yang adil, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Selain itu, peningkatan kredibilitas institusi dapat memberikan keyakinan kepada investor sehingga mempercepat arus modal masuk yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.
2. Diversifikasi Ekonomi  
Negara berkembang perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu dengan mengembangkan sektor lain, seperti manufaktur, jasa, teknologi informasi, dan pariwisata. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi harga pasar global tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan memastikan pemerataan pendapatan.
3. Investasi dalam Pendidikan dan Infrastruktur  
Pembangunan ekonomi memerlukan fokus pada peningkatan modal manusia melalui pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, investasi besar dalam infrastruktur fisik (jalan raya, pelabuhan, telekomunikasi, listrik) akan mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan memudahkan distribusi barang serta jasa. Keduanya saling melengkapi dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.
4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi  
Ketimpangan ekonomi perlu ditangani dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif, seperti pajak progresif, subsidi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat miskin, menciptakan keadilan sosial, dan mendukung stabilitas ekonomi serta sosial dalam jangka panjang.

5. Stabilitas Politik dan Ekonomi

Ketidakstabilan politik sering kali menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang stabil melalui kebijakan yang inklusif dan meredam pengaruh kelompok tertentu yang dapat memicu instabilitas.

6. Kolaborasi Global dan Regional

Negara berkembang perlu menjalin kerja sama ekonomi regional untuk memanfaatkan peluang global dan mengurangi ketergantungan pada negara maju. Contohnya adalah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang berhasil mengurangi ketergantungan pada sektor agrikultur dengan memanfaatkan potensi sektor teknologi dan pariwisata.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Naim, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penyusunan artikel ini. Semoga kebaikan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Esa. Kami berharap agar artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam dunia pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, and Poverty*, Crown Business.
- Adam Smith. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
- Bank Dunia. (2020). *World Development Report 2020: Education for the Changing World*. World Bank Group.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Bourguignon, F. (2015). *The Globalization of inequality*. Princeton University Press.
- David Ricardo. (1817). *Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Easterly, W. (2001). *The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*. MIT Press.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*:

- Historical Studies of Chile and Brazil. New York: Monthly Review Press.
- Friedman, M. (1968). "The Role of Monetary Policy." *American Economic Review*, 58(1), 1-17.
- Green, M. (2016). *Institutions, Development, and Economic Growth: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Huang, Y. (2015). *Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State*. Cambridge University Press.
- IMF. (2018). *Fiscal Monitor: How to Mitigate the Impact of Economic Shocks*. International Monetary Fund.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
- Korea Development Institute (KDI). (2021). *Economic Diversification and Growth in Korea*. KDI Press.
- North, D. C. (1991). "Institutions." *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97-112.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Prebisch, R. (1949). "The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems." *Economic Bulletin for Latin America*.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodrik, D. (2013). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W.W. Norton & Company.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Solow, R. M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Swan, T. W. (1956). "Economic Growth and Capital Accumulation." *Economic Record*, 32(2), 334-361.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*, Alfred A. Knopf.
- Singh, A. (2016). *The Role of Diversification in Developing Economies*. World Bank Policy Research Working Paper No. 7706.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. W.W. Norton & Company.
- Sutrisno, H. (2020). Sinergi Pendidikan, Industri, dan Pemerintah dalam Mendukung Ekosistem Pembelajaran Digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 5(4), 67-79.
- Tapscott, D. (1997). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for*

Sustainable Development. New York: United Nations.

- World Economic Forum. (2021). *The Global Risks Report 2021*. Geneva: World Economic Forum.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank Group.
- World Economic Forum (WEF). (2020). *The Global Competitiveness Report 2020*. WEF.
- Yellen, J. L. (2015). The Economic Benefits of Reducing Inequality. *Economic Review*, 91(1), 28-42.
- World Bank. (2012). *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*. Washington, DC: World Bank.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
- Zimmerman, B. (2000). Concepts of Digital Economy and Its Global Impact on Economic Systems. *International Journal of Information Management*, 20(4), 329-342.